

Korupsi: Menelusuri Akar Persoalan dan Menemukan Alternatif Pemecahannya

Oleh: Siti Fatimah

ABSTRACT

Corruption is a most dangerous crime among the others. It will have social implications in society, such as social imbalance and inequality. This article will analyze some issues related to the corruption, such as why the corruption be something usual in this country (Indonesia); what factors cause someone to corrupt in this country; and what can we do to overcome the issue of corruption. This article also tries to analyze the issue of corruption in educational institution.

Kata kunci: Korupsi, birokrasi, kesenjangan sosial, ketidakadilan

I. PENDAHULUAN

Jika mampu menyimak beberapa informasi dan data yang dilaporkan oleh beberapa lembaga yang berkompeten tentang korupsi di negara ini, akan menunjukkan satu hal yang sangat fantastis dan merisaukan. *Political and Economic Risk Consultancy* (PERS), menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup di Asia dengan nilai 9.92, bahkan di atas Vietnam dengan nilai 8.67, dengan rentangan skala 0-10.¹ HS Dillon menyatakan korupsi di kalangan pegawai negeri (PNS) mencapai angka 95%.² Menurut laporan BPK tahun

2003, Departemen Pendidikan merupakan instansi terkorup setelah Departemen Agama. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melaporkan korupsi di bidang pendidikan telah dilakukan dalam berbagai jenjang: mulai dari tingkat sekolah, dinas, sampai departemen; mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas dan seterusnya masuk ke dalam jaringan korupsi.³ *Transparency International Indonesia* (TII) melaporkan, di antara 133 negara yang disurvei di dunia, Indonesia menempati urutan ke 6 negara-

¹ Paulus Mujiran. 2004. *Republik Para Maling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p.28.

² *Ibid.*, hal.: 5

³ *Kompas*, 3 Mei 2005

negara paling terkorup di dunia. Indonesia sejajar dengan Kenya.⁴

Dari sebagian kecil informasi yang telah dikemukakan di atas, muncul beberapa persoalan dan pertanyaan penting yang patut kita diskusikan sebagai *concern* kita semua terhadap kondisi negeri yang sudah berada di ambang kehancuran. *Pertama*, kenapa korupsi seperti hal yang sudah lumrah di Negara ini? *Kedua*, faktor apakah yang menyebabkan korupsi merajalela di Negara tercinta ini. *Ketiga*, Apakah solusi yang bisa dicarikan untuk mengatasinya? *Terakhir*, bagaimanakah bentuk korupsi yang terjadi di lembaga pendidikan di Indonesia?

Pakar korupsi Robert Klitgaard menulis bahwa munculnya korupsi disebabkan oleh tumbuhnya kesempatan, resiko kecil, dan mental lembek. Menurut Baharuddin Lopa, salah satu yang menyebabkan terjadinya korupsi dan pelanggaran hukum adalah oleh karena pejabat Negara yang serakah.⁵ Jika ingin menelusuri atau mengurut dari manakah pangkal persoalannya korupsi di Negara ini sama halnya dengan menyelesaikan benang kusut, dicari ke mana ujung dan pangkalnya tetap tak pernah bertemu dan selesai. Sebegitu rumitkah persoalan korupsi di Negara

yang kira-kira 90% katanya penganut agama Islam?.

Dalam kenyataannya, hampir tidak ada yang “merasa” apalagi mengaku sebagai “koruptor”. Padahal tidak sedikit aturan hukum sebagai landasan, tidak kurang penegak hukum, tidak sunyi berita di media, atau nasihat-nasihat Kiai di mimbar pengajian. Namun banjir korupsi tidak surut secepat banjir sesungguhnya.

Jika diamati lebih jauh, ada banyak jenis dan bentuk korupsi yang sudah terjadi, mulai dari berskala kecil, menengah sampai besar; mulai dari korupsi perorangan sampai kelompok. Dalam skala kecil, misalnya, mulai dari pengurusan KTP di kantor Lurah, pengurusan SIM di kantor polisi, pelanggaran lalu lintas, pengurusan izin usaha, pengadaan barang, dan seterusnya, semuanya ini sarat dengan korupsi. Dalam skala besar dapat pula dilihat berbagai korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi Negara, baik secara individu maupun kelompok. Sebut saja kasus Pertamina, BLBI, Bulog, kasus aliran dana BI yang sedang hangat-hangatnya sekarang, penyelewengan penggunaan anggaran APBD di berbagai Kabupaten dan Kota. Keseluruhannya bukan menjadi rahasia lagi. Hampir setiap hari layar televisi, media massa dipenuhi dengan berita-berita tersebut, namun korupsi tak kunjung *redup* jua.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang paling berbahaya

⁴ Robert Klitgaard, Ronald Maclean dan H.Lindsay Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan daerah*. Jakarta: Obor. p. 18.

⁵ *Media Transparansi*, Edisi 4/ Januari 1999.

dibanding kejahatan lain, misalnya pencurian, perampokan dan pembunuhan. Korupsi akan berimplikasi sosial kepada orang lain. Korupsi tidak saja menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan, tetapi juga kepada nasib dan dosa orang lain. Korupsi tentang pengadaan buku sekolah, misalnya, akan merugikan ribuan anak didik dan dalam jangka panjang membawa kebangkrutan dalam dunia pendidikan. Sebuah pemandangan yang sudah terbiasa di kantor-kantor pemerintah sering terlihat bagaimana iklim kerja tidak produktif, pegawai bermental lembek, suka menunda-nunda pekerjaan, tidak disiplin, dan memilih pekerjaan yang ringan-ringan saja tetapi menghasilkan banyak uang.

II. BEBERAPA PENDAPAT DAN KAJIAN TEORI TENTANG KORUPSI

Syed Husein Alatas sejalan dengan pendekatan yang digunakan Willian J. Chambliss dan Dillon melihat korupsi sebagai bagian yang integral dari setiap birokrasi sebagai akibat dari konflik kepentingan antara segelintir pengusaha, penegak hukum, birokrat dan politisi. Teori yang dikemukakan Alatas adalah hasil refleksi dari gejala korupsi di Asia. Pendekatan Chambliss merupakan sebuah refleksi terhadap munculnya “cabal” (jejaring) di sebagian besar kota-kota di Amerika Serikat. Chambliss menyebut korupsi sebagai kejahatan yang

terorganisir dan bukan bagian yang terpisah, melainkan semacam birokrasi pemerintah yang berbentuk jejaring yang terdiri dari birokrat, politisi, pengusaha, dan aparat penegak hukum.⁶ Sedangkan Djilas menggali persoalan korupsi dan koruptor dari sistem ekonomi sosialis, yang kemudian menimbulkan “kelas baru” dalam sebuah Negara. Hal ini mirip dengan zaman Orde Baru di Indonesia, dengan partai tunggalnya Golkar.⁷ Sementara Alatas menekankan kepada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme.⁸

Terdapat tiga lapis korupsi menurut kerangka teori Alatas, Chambliss, dan Djilas. Korupsi lapisan pertama berupa suap (*bribery*) dan pemerasan (*extortion*). Korupsi lapisan kedua, nepotisme dan kronisme. Lapisan ke tiga jejaring yang meliputi pemerintah, politisi, pengusaha, dan aparat penegak hukum. Namun bila dilihat lebih jauh ketiga kerangka teori ini bergerak untuk level dan skala yang besar. Meskipun dalam skala kecil ia merupakan bagian yang intergral dari korupsi skala besar.

Menurut budayawan Mochtar Lubis, penyebab korupsi merajalela di

⁶ George Junus Aditjondro. *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hal.: 5-7.

⁷ *Ibid.*

⁸ Syed Husein Alatas. 1975 *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, hal.:12.

Indonesia adalah “birokrasi patrimonial”⁹, yaitu ketika dalam birokrasi orang-orang (aparatur birokrasi) lebih mengutamakan hubungan-hubungan *irrational* daripada hubungan yang *rasional*, misalnya: sanak famili dan teman dekat, serta tidak adanya nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi. Oleh karena itu menurutnya strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan transformasi budaya melalui pendidikan dan pemberian teladan. Namun yang menjadi persoalan adalah di lembaga pendidikan itu sendiri penuh dengan korupsi, dan di sisi lain siapakah yang dapat menjadi pemberi teladan tersebut.

III. KORUPSI DARI DAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Pada bagian pendahuluan sudah disinggung bahwa Departemen Pendidikan merupakan instansi terkorup setelah Departemen Agama di Indonesia. Pada tahun 2006 kita dihebohkan dengan kelulusan ujian nasional. Ada di antara Kepala Daerah dan Dinas yang menginginkan seluruh peserta UAN lulus. Kemudian dibuat tim sukses. Soal-soal diselesaikan oleh

tim sukses. Di sisi lain ada pula informasi soal-soal diselesaikan di ruang khusus sebelum dikirim ke tangan pemeriksa. Hal yang sama ternyata masih terjadi dalam UAN saat ini. 18 guru ditangkap polisi karena tertangkap merubah lembaran jawaban siswa di Lubuk Pakam.¹⁰

Guru yang diagungkan sebagai pahlawan tanpa jasa, pendidik nurani bangsa, telah menodai profesinya dengan contoh-contoh perilaku yang sama sekali tidak mengandung nilai-nilai edukatif yang baik, melainkan sebaliknya, dengan kata lain bermental korup. Kesemua ini dilakukan hanya untuk menutupi kebodohan mengajar, gengsi sekolah, agar sekolah dianggap berprestasi. Bila anak didik berhasil karena curang, UAN lulus dengan curang, masuk perguruan tinggi dengan joki, mendapat pekerjaan dengan menyogok dan cara-cara culas lainnya, bagaimana kalau mereka sempat menjabat posisi-posisi strategis nantinya.

Sistem pendidikan di Indonesia ternyata tidak mendidik anak didik mengembangkan budaya proses, melainkan budaya *instant*. Mentalitas menyontek, menyogok, menjiplak, termasuk dalam penulisan skripsi dan karya ilmiah menunjukkan rapuhnya mental anak didik. Mental yang terbangun selama masa pendidikan bagaimanapun menjadi cermin

⁹ Mochtar Lubis dan James C. Scott, (ed.). 1985. *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, p. xvi-xvii. Lihat juga Adri Febrianto. 2005. “Korupsi dari Sudut Pandang Antropologi” dalam *Jurnal Antropologi*, Tahun V, Nomor 7, Januari-Juni 2004.

¹⁰ *Metro Pagi*, 24 April 2008

keseluruhan masa depan anak didik yang bersangkutan. Perilaku korupsi memiliki korelasi langsung dengan lembeknya mental dan ketidakmatangan kepribadian.

Terlalu sesak tulisan sederhana ini jika data dan kasus-kasus tentang korupsi di lembaga pendidikan diungkapkan. Dua hari yang lalu penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang guru sekolah dasar di dekat tempat tinggal saya. Ternyata setiap Penilik Sekolah (PS) datang, buru-buru Kepala Sekolahnya mencari amplop dan uang sepuluh ribu atau kadang-kadang hanya uang lima ribu rupiah.¹¹ Sungguh suatu hal yang sangat memprihatinkan.

IV. BEBERAPA STRATEGI YANG DITAWARKAN PARA AHLI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pakar korupsi Robert Klitgaard yang telah melakukan penelitian di sejumlah Negara berkesimpulan tentang strategi pemberantasan korupsi, antara lain: (1) adanya kemauan politik (*political will*) dari penguasa; (2) adanya *pressure* dari berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat; (3) tindakan dalam skala kecil dalam menghilangkan biaya-biaya *siluman*.¹² Magnis Suseno dan Syafii' Maa'rif berpendapat gerakan anti korupsi

dapat dimulai dari snetuhan spiritual oleh pemuka-pemuka agama. Menurut mereka penyadaran melalui aspek spiritual dan agama jauh lebih bermanfaat. Meskipun demikian, untuk pembuktiannya tentu perlu dibarengi dengan pengkajian dan penelitian juga. Sementara Kwik Kuan Gie, menawarkan konsep sederhana dalam pemberantasan korupsi, yaitu: "*carrot and stick*".¹³ Carrot adalah pendapatan bersih (*net take home pay*) untuk pegawai negeri sipil maupun TNI atau Polri yang mencukupi hidup standar sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, tanggungjawab, kepemimpinan dan martabatnya. Stick adalah hukum yang digunakan kalau semuanya sudah dipenuhi dan masih berani melakukan korupsi.

Korupsi adalah tindak kejahatan kalkulas yang menggunakan pikiran, dan bukan kejahatan yang didorong emosi. Memang benar ada orang yang jujur dan mampu menolak segala godaan, dan ada pejabat yang jujur dan berhasil menolak sebagian besar godaan. Tetapi bila suap yang ditawarkan jumlahnya besar sedangkan kemungkinan tertangkap sangat kecil, dan jika sanksi yang dijatuhkan jika tertangkap cukup ringan, maka banyak pejabat yang tergoda menerima suap. Oleh karena itu, pemecahan yang dilakukan haruslah melalui sebuah sistem. Monopoli harus dikikis dan dilenyapkan. Batas-batas wewenang harus jelas. Akuntabilitas harus ditingkatkan. Kemungkinan ter-

¹¹ Wawancara, 23 April 2004.

¹² Robert Klitgaard, Ronald Macleone dan H.Lindsay Parris. 2005. *Op cit*, hal: 18.

¹³ Paulus Mujiran. 2004, hal: 31.

tangkap basah harus diperbesar, dan hukum bagi pelaku korupsi harus diperberat. Insentif harus dikaitkan dengan hasil kerja.

Strategi semacam ini sudah dilakukan dan dipraktekkan oleh Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE), FIS-UNP, dengan dukungan dari *The Asia Foundation*. di beberapa Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Ternyata tidak sedikit kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan pendampingan tersebut.

V. PENUTUP

Banyak ahli dan pendapat yang sudah menawarkan berbagai strategi yang bisa dipakai untuk mengurangi dan mengikis korupsi, namun sampai saat ini belum terdapat obat penawar yang

jitu. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena: *Pertama*, regulasi yang dibuat oleh eksekutif maupun legislatif masih sarat dengan dimensi dan peluang KKN; dengan kata lain masih abu-abu. Pada bulan November 1998, masyarakat transparansi Indonesia mengumumkan temuannya bahwa 79 keputusan Presiden mengandung indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Kedua*, belum terbentuknya mekanisme kontrol yang komprehensif. *Ketiga*, belum terciptanya kemauan politik (*political will*) yang serius dan terpadu dari Negara dan penguasa. *Keempat*, masih terkalahkannya segelintir orang yang punya integritas tinggi dalam memberantas korupsi oleh orang yang diuntungkan dengan korupsi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- George Junus Aditjondro, *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), hal. 5-7.
Kompas, 3 Mei 2005
Media Transparansi, Edisi 4/ Januari 1999.
Metro Pagi, 24 April 2008
Mochtar Lubis dan James C. Scott, (ed.), *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. xvi-xvii. Lihat juga Adri Febrianto, "Korupsi dari Sudut Pandang Antropologi" dalam *Jurnal Antropologi*, Tahun V, Nomor 7, Januari-Juni 2004.
Paulus Mujiran *Republik Para Maling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p.28.
Robert Klitgaard, Ronald Maclean dan H.Lindsay Parris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Obor, 2005), hal. 18.
Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1975), hal.12.